

Mewujudkan Rekonsiliasi

PERISTIWA 1965-1966 merupakan tragedi kemanusiaan paling hitam dalam sejarah modern Indonesia. Meski sudah hampir 30 tahun berlalu, data yang tepat mengenai jumlah korban jiwa peristiwa tersebut masih gelap. Angka yang mengemuka adalah antara 500.000 (hasil intesvigasi tim Oey Tjoe Tat (alm.) dan 2.000.000 (angka yang pernah dituturkan oleh Jenderal Sarwo Edhie (alm). Liang lahat korban-korban pembantain itupun tidak diketahui sampai detik ini. Beberapa kuburan massal memang ditemukan akan tetapi baru satu atau dua yang digali atas desakan keluarga. Tak pelak lagi, peristiwa 1965 merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup.

Bagi kita yang terpenting sekarang adalah melakukan upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi korbannya. Alasan pengambilan fokus pada momentum tersebut, antara lain: *Pertama*, tragedi ini mempunyai skala besar dari segi cakupan area dan jumlah korban. *Kedua*, pembunuhan itu disertai stigmatisasi pascaperistiwa yang tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi terhadap keluarganya. Tidak hanya dalam pengertian *nucleus family* tatapi juga mencakup *extended family*. Stigmatisasi itu berjalan sangat lama, bahkan akan berjalan lebih lama lagi ke masa depan jika tidak teratasi pada periode sekarang. *Ketiga*, corak stigmatisasi tersebut tidak semata-mata ideologis, tetapi juga merembet kepada penghilangan hak-hak sipil dan politik secara massif dan berganda (*multiple victimation*) karena menyangkut *extended family*. *Keempat*, tragedi itu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain sebagai pelaku, yang melibatkan segmen terbesar bangsa ini, yakni umat Islam. Dalam kaitan ini, konflik memperoleh dasar pembenaran teologisnya. *Kelima*,

hingga saat ini belum ada inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, khususnya dari Nahdlatul Ulama, dan Ormas Islam lain, untuk mendukung proses rekonsiliasi dan rehabilitasi korban politik Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 tersebut.

Pada tingkat yang sederhana, permintaan maaf pernah dilontarkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh NU. Bukan hanya itu, sewaktu menjadi Presiden RI, Wahid juga mengusulkan agar TAP MPRS no. XXV/1966 dicabut. Sayangnya, permintaan maaf tersebut ditanggapi secara "dingin" dan belum memberikan dampak psikologis yang signifikan. Sementara, usulan Wahid perihal pencabutan TAP MPRS juga diartikan secara salah oleh parlemen dan berbagai pihak yang anti-komunis. Bahkan, para penentang usulan tersebut curiga jang-jangan dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut kaum komunis bangkit kembali. Kecurigaan ini semakin kuat mengemuka seiring dengan kondisi sosial-kemasyarakatan saat usul itu diajukan. Kondisi yang dimaksud itu, antara lain, supremasi hukum belum juga tercipta, tingginya angka pengangguran (mencapai 47 juta orang), kemiskinan, dan pengungsian (ada 0,5 juta orang). "Itu ladang yang amat subur bagi tumbuhnya komunisme," ujar budayawan Taufiq Ismail dalam sebuah diskusi di Radio Trijaya Jakarta. Padahal, tanpa TAP MPRS tersebut dicabut, rekonsiliasi menjadi mustahil.

Demikianlah, seolah tidak ada jalan lain bagi kaum komunis di Indonesia selain mengubur diri untuk selama-lamanya. Tak pelak lagi, jalan menuju rekonsiliasi sangatlah terjal dan berkelok. Padahal, kita yakin, rekonsiliasi merupakan jalan yang benar sebagai cara mewujudkan terciptanya masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. ❖

Selamat Membaca.